

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG  
PERIODE TAHUN 2014-2021 PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**ROHAYATI**

**NPM : 1951010483**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG  
PERIODE TAHUN 2014-2021 PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**ROHAYATI**

**NPM : 1951010483**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Nurlaili, M.A**

**Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah daerah dalam menjalankan program-program untuk membangun perekonomian suatu daerah, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam menggunakan dan merealisasikan dana tersebut lewat pembangunan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan di daerah itu sendiri. Permasalahan yang diteliti adalah adanya realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang meningkat apakah memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten tulang bawang. Maka rumusan masalah yaitu Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sebagai indikator kesejahteraan masyarakat kabupaten tulang bawang tahun 2014-2021?

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data publikasi BPS Kabupaten Tulang Bawang. Jenis data yang digunakan adalah *data time series*, yaitu tahun 2014-2021. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Hasil analisis penelitian ini yaitu menunjukkan adanya pengaruh parsial Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia. Karena pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tersebut secara merata untuk membangun dan meningkatkan pelayanan *public* sehingga masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Sedangkan di sisi lain secara parsial dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan dana perimbangan Kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2014-2021 cenderung tidak stabil. Dalam mendistribusikan pendapatan daerah kabupaten tulang bawang sudah menggunakan prinsip-prinsip seperti keadilan, kekhalfahan dan ketauhidan sehingga dapat menghasilkan *falah* dan *maslahah*.

**Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kesejahteraan, Ekonomi Islam**

## ABSTRACT

*This research is motivated by Regional Original Revenue and Balancing Fund which is one of the most important aspects of a region in carrying out programs to develop a region's economy, including programs to prosper the people in its region. Local governments are required to be as good as possible in using and realizing these funds through development that has an impact on the level of welfare in the region itself. The problem studied is the realization of PAD and the Balancing Fund which increases whether it affects the welfare of the people of tulang bawang district. So the formulation of the problem is whether the Regional Original Income and Balancing Fund affect the human development index as an indicator of the welfare of the people of tulang bawang district in 2014-2021?*

*This study used quantitative methods and the type of data used was secondary data obtained from BPS Tulang Bawang Regency. The type of data used is time series data, namely 2014-2021. For the data analysis process using multiple linear regression analysis with Regional Original Income (X1), Balancing Fund (X2) and Community Welfare (Y).*

*The results of this research analysis show the partial influence of Regional Original Income on Community Welfare as indicated by the Human Development Index. Because local governments can allocate these funds evenly to build and improve public services so that people can access development results such as in obtaining income, health, education and others. Meanwhile, on the other hand, partially, the balancing fund does not affect the welfare of the community. This is because the balance fund of Tulang Bawang Regency for the 2014-2021 period tends to be unstable. In distributing regional revenues, Tulang Bawang District has used principles such as justice, caliphate and monotheism so as to produce falah and masalah*

***Keywords: Local Original Revenue, Equalization Fund, Welfare, Islamic Economy***



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

---

Alamat : Jln. Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131. Telp.(0721)703289

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohayati  
Npm : 1951010483  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam" adalah benar merupakan hasil secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya (penulis) bukan dari duplikasi maupun saduran dari karya orang lain, kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dicantumkan dalam footnote dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Rohayati

NPM.1951010483



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana  
Perimbangan Terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode  
Tahun 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam**

**Nama : Rohayati  
NPM : 1951010483  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Nurlaili, M.A.**  
**NIP. 197710152005012003**

  
**M. Yusuf Bahtiar, M.E.**  
**NIP. 198912082018011001**

**Mengetahui  
Program Studi Ekonomi Syariah**

  
**Dr. Erike Angeraeni, M.E.Sv.**  
**NIP. 1982080820112011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh Rohayati, NPM : 1951010483 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : H. Supaijo, S.H., M.H**

(.....)

**Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M.**

(.....)

**Penguji I : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak**

(.....)

**Penguji II : M. Yusuf Bahtiar, M.E**

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Liliyandani, S.E., M.M., Akt., CA

009262008011008

## MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

(Q.S. Al-Hasyr:7)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>“Qur’an Kemenag.” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur selalu diucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Untuk bapak dan ibuku tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih. Saya persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku bapak Ade dan Ibu Atikah yang telah memberikan begitu banyak dukungan dan cinta kasih yang tidak bisa saya balas. Semoga ini adalah langkah awal untuk membahagiakan bapak dan ibu. Terimakasih sudah selalu sehat dan mengantarkanku untuk menempuh pendidikan ke jenjang sarjana, doaku untuk bapak dan ibu semoga kalian berdua selalu bisa menemani langkah kecilku untuk menuju kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kalian termasuk kedalam golongan-golongan yang berda dibarisan Nabi Muhammad SAW, kelak. Aamiin
2. Kakak-kakak dan saudaraku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menaruh harapan serta memberi dukungan, doa, semangat, dan nasehatnya selama ini.
3. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan semangat.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi oleh orang tua dengan nama Rohayati yang dilahirkan di Kekatung, 27 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke 7 (tujuh) dari pasangan orang tua yang bernama Ade dan Atikah. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. SDN 01 Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
2. MTs Al-Hidayah Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
3. SMAN 01 Dente Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 mengambil jurusan ekonomi syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama di perkuliahan penulis mengikuti UKM Risef (Raden Intan Syariah Economic Forum) dan UKM PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Sahabat.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam.**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga memberikan dampak positif untuk semua pembaca pada umumnya. Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, tentu penulis mengalami berbagai dinamika yang cukup menyulitkan. Namun, berkat semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa dukungan moril maupun materil dalam proses pengerjaan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat ridho dan karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt, C. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nurlaili, S.Ag, M.A selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi terbaik.
5. Bapak M.Yusuf Bahtiar, M.E selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat serta motivasi terbaik.

6. Para staff akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
9. Untuk sahabatku Revi Safitri, S.E dan Rizka Fathi Aulia, S.Pd Silvani Saputri, S.E, Oktavia Rintayani, S.Sos, Firda Fitriani Zahro, S.Pd dan Desti Setiawati, terima kasih banyak atas kebersamaannya dalam perjalanan sampai pada saat ini. Baik dalam memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang tulus serta mendengarkan keluh kesah saya dalam menyelesaikan skripsi ini *and see you on top guys*.
10. Sahabat seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas G dan semua teman-teman kecil penulis di desa Kekatung yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
11. Kepada instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang yang telah mengizinkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang peneliti butuhkan.
12. Tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri yaitu Rohayati S.E. karena sudah bisa bertahan, berjuang melawan rasa sepi, sedih, kecewa dan rasa malas dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga pencapaian ini mengantarkanku pada masa depan yang cerah.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2023  
Penulis

Rohayati  
Npm: 1951010483

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Manfaat Penelitian .....	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	18
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>25</b>
A. Stewardship Theory .....	25
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	28
C. Dana Perimbangan.....	33
D. Penerimaan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam... 38	
E. Kesejahteraan Masyarakat .....	43
1. Pengertian Kesejahteraan.....	43
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	48
F. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam.....	59
G. Kerangka Konseptual.....	65
H. Hipotesis .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>71</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	71
B. Sumber Data .....	

C.	Populasi, Sempel dan Teknik Pengumpulan Data .....	72
D.	Definisi Oprasional Variabel dan Variabel Penelitian...	74
E.	Metode dan Alat Analisis .....	75
	1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
	2. Pengujian Asumsi Klasik.....	76
	3. Koefisien Determinasi .....	81

**BAB IV HASIL PENELITIAN, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ..... 83**

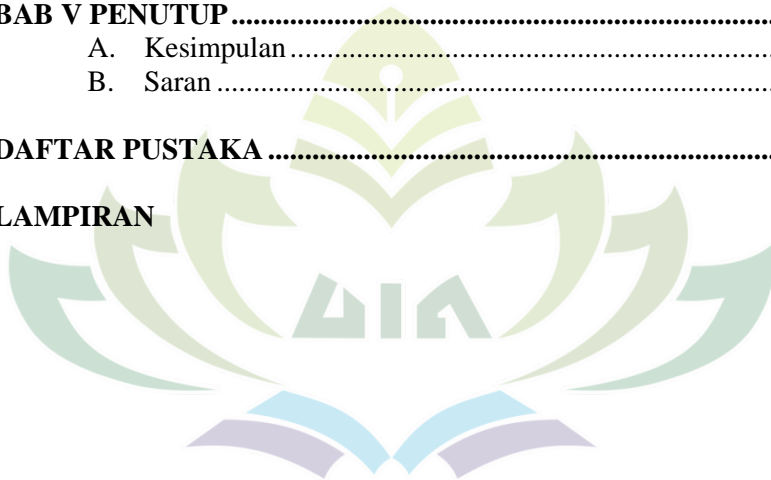
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	83
B.	Gambaran Hasil Penelitian .....	91
C.	Hasil Uji Analisis data .....	94
D.	Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis .....	103

**BAB V PENUTUP ..... 113**

A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA ..... 117**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2021 .....	4
1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Tulang Bawang (Ribu Rupiah) Periode 2014-2021 .....	7
4. 1 Daftar kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Tulang Bawang.....	86
4. 2 Demografi Kabupaten Tulang Bawang.....	88
4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.....	89
4. 4 Realisasi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2021 .....	91
4. 5 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2021 .....	92
4. 6 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2021 .....	93
4. 7 Tabel Uji Normalitas.....	94
4. 8 Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	95
4. 9 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	97
4. 10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	98
4. 11 Hasil Uji-t Parsial.....	101
4. 12 Hasil Uji-t Pendapatan Asli Daerah .....	101
4. 13 Hasil Uji-t Dana Perimbangan .....	102
4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Model Analisis .....	66
4. 1 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas .....	97





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal penulis akan memaparkan beberapa maksud istilah yang digunakan dalam proposal ini agar pembaca mudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam mengambil maksud dan istilah yang menjadi judul. Adapun judul yang dimaksud adalah **Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam.**

Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah dari judul tersebut sebagai berikut :

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.<sup>1</sup>

#### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.<sup>2</sup>

#### 3. Dana Perimbangan

---

<sup>1</sup>Kurniati Indah, “Analisis Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Ex-Dividend Date (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Keuangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Syariah Periode 2014-2018 Perspektif Ekonomi Islam)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

<sup>2</sup>Novi Dwi Purwanti, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 2, no. 3 (2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”<sup>3</sup>

#### 4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa, terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan pendidikan, lapangan pekerjaan dan pendapatan.<sup>4</sup>

#### 5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.<sup>5</sup>

#### 6. Ekonomi Islam

Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diperjelas bahwa yang dimaksud judul proposal ini adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan yang berfluktuatif, dan Indeks Pembangunan

---

<sup>3</sup>Husaeri Priatna and Jaya Purwadinata, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung),” *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2019): 62–74.

<sup>4</sup>Suminartini Suminartini and Susilawati Susilawati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 3 (2020): 226–37.

<sup>5</sup>Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Maro* 1, no. 2 (2018): 117–22.

<sup>6</sup>Anggraini Cindy, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

Manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan pemerintah yang memiliki kemampuan professional. Selain itu, pembangunan daerah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga terwujudnya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata.<sup>7</sup>

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, pendidikan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Pandangan masyarakat umum dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif.<sup>8</sup>

Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Pratowo, keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan parameter yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal *Human Development Indeks* (HDI) merupakan suatu konsep dari program UNDP untuk menanggulangi kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat

---

<sup>7</sup>Dina Mei Eka Aditya And Maryono Maryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi)," 2018.

<sup>8</sup>Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang," *Jurnal El-Riyasah* 11, no. 1 (2020): 67–83.

merupakan cita-cita yang ingin diraih setiap daerah, Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diamati dari angka angka IPM.<sup>9</sup> Yang dimana dalam hal ini IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai suatu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan berbagai indikator pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Informasi mengenai perkembangan kesejahteraan masyarakat sangat penting karena dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan manusianya. Peningkatan pembangunan manusia yang ditunjukkan dari IPM yang meningkat mencerminkan indeks kesejahteraan masyarakat yang terjadi di kabupaten Tulang Bawang.<sup>10</sup>

Tabel 1. 1  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulang Bawang  
Tahun 2014-2021

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>
2014	65.83
2015	66.08
2016	66.74
2017	67.07
2018	67.70
2019	68.23
2020	68.52
2021	68.73

*Sumber : BPS data diolah*

<sup>9</sup>Desak Nyoman Utami and I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal EP Unud* 8, no. 10 (2019): 2195–2225.

<sup>10</sup>I A Rosita and I Ketut Sutrisna, “Pengaruh. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi,” *E-Jurnal EP Unud* 7, no. 7 (2018): 1445–71.

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2014-2021. Pada tahun 2014 IPM Kabupaten Tulang Bawang sebesar 65.83 dan tahun 2015 sebesar 66.08, tahun 2016 sebesar 66.74 dan tahun 2017 IPM Kabupaten Tulang Bawang Sebesar 67,07 dan tahun 2018 sebesar 67,70 pada tahun 2019 sebesar 68,23 dan pada tahun 2020 sebesar 68,52 pada tahun 2021 sebesar 68,73. Jika dilihat berdasarkan data tabel diatas laju pertumbuhan IPM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2014-2021 ini mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti pembangunan manusia Tulang Bawang terus mengalami kemajuan. IPM Tulang Bawang menempati peringkat ke-6 di Lampung.

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pelaksanaan pembangunan pada setiap daerah merupakan bagian dari terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah. Dimana otonomi daerah ini memberikan hak dan wewenang dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.<sup>11</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam membangun perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dimana dana

---

<sup>11</sup>Alfan Fuad Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur," 2021.

tersebut diperoleh dari masyarakat maka masyarakat berhak mendapatkan kelayakan dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tersebut.<sup>12</sup> Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).



---

<sup>12</sup>Rahmawari Dedek, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

Tabel 1. 2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Tulang Bawang (Ribuan Rupiah) Periode 2014-2021

Jenis Pendapatan [APBD]	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Ribuan Rupiah)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>24,444,892.15</b>	<b>34,088,549.87</b>	<b>24,416,719.39</b>	<b>40,931,506.76</b>	<b>67,129,956.00</b>	<b>82,379,613.00</b>	<b>89,767,355.00</b>	<b>106,614,737.07</b>
1.1 Pajak Daerah	13,175,797.96	14,503,936.67	14,107,628.35	20,788,976.11	19,836,334.00	25,900,833.00	24,330,462.00	29,511,434.50
1.2 Retribusi Daerah	2,915,095.52	4,967,170.10	2,301,230.46	1,628,987.03	1,530,350.00	1,244,629.00	1,447,690.00	1,586,730.30
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,520,417.06	3,553,189.11	3,612,546.64	3,047,289.32	3,078,120.00	3,089,662	3,338,822.00	4,258,697.04
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	4,833,581.62	11,064,253.99	6,395,313.94	15,466,254.31	42,685,152.00	52,144,489.00	60,650,382.00	71,257,875.23

<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>649,804,534.37</b>	<b>748,924,608.92</b>	<b>861,646,584.00</b>	<b>825,407,650.78</b>	<b>903,489,250.00</b>	<b>823,127,374.00</b>	<b>782,510,620.00</b>	<b>779,733,467.69</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak	35,082,992.23	28,973,747.30	28,149,261.55	21,789,653.17	18,466,266.00	17,904,922.00	15,927,661.00	27,047,832.04
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	21,679,798.14	10,858,516.62	6,147,451.10	14,469,873.03	15,435,304.00	5,709,085.00	7,566,706.00	12,818,934.72
2.3 Dana Alokasi Umum	533,313,684	548,942,825	614,655,240.00	599,655,961.00	612,112,587.00	639,461,562.00	577,189,919.00	570,870,961.00
2.4 Dana Alokasi Khusus	59,728,060	160,149,520	212,694,631.35	189,492,163.58	257,474,993.00	160,081,805.00	181,826,835.00	168,995,739.93

*Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023*



Berdasarkan tabel 1.2 diatas yaitu realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang meningkat menunjukkan bahwa tinggi nya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dan Dana Perimbangan yang berfluktuatif. Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini menggambarkan bahwasannya masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang dapat dilihat dari dana perimbangan yang diperoleh.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tarif pajak dan retribusi daerah juga tergantung pada wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan batas maksimum berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun jumlah dan jenis objek pajak serta dasar pajak daerah tergantung pada situasi perekonomian daerah tersebut. Apabila perekonomian di suatu daerah mengalami kemajuan, maka semakin meningkat pula jenis dan objek pajak yang dapat dikenai pajak maupun retribusi daerah. Artinya, agar PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkat, maka perekonomian di daerah tersebut harus didorong agar mampu berkembang dengan pesat pula. Setidaknya pemerintah daerah yang bersangkutan diharapkan dapat menyelenggarakan pungutan berupa pajak daerah dan

retribusi daerah dalam rangka meningkatkan keuangan daerah.

<sup>13</sup>

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi individu, baik untuk mengontrol dan mengatur kegiatan atau terlibat dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi di mana tidak semua individu dapat berpartisipasi. Intervensi negara dalam masalah perekonomian rakyat. Peran pemerintah daerah selalu diharapkan mampu mengoptimalkan peluang Kabupaten/Kota. Sehingga peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat semakin diperkuat di masa mendatang. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak dan industri PAD lainnya sehingga secara bersama-sama dapat menopang pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan.<sup>14</sup>

Menurut ekonomi islam, negara seharusnya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi dengan adil dan merata sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat dalam hal mengakses sumber daya ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keberkahan. Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kepada kemashlahatan umum. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih. Firman Allah Taala QS. An-Nisa ayat 29<sup>15</sup> :

---

<sup>13</sup>Mubarrizi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur.”

<sup>14</sup>Mubarrizi.

<sup>15</sup>Gazali Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2015): 84–102.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil... ” (QS. An-Nisa’:29)*

Salah satu kaidah ushul fiqih menyatakan “kemashlahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemashlahatan yang khusus”. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki. *Al-Mashlahah Mursalah* merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari’at memelihara berbagai kemashlahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemashlahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.<sup>16</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah dibiayai oleh pendapatan daerah dimana sumber pendapatan daerah yaitu dari dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pendapatan lainnya yang sah dari daerah.<sup>17</sup> Di sisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<sup>16</sup>Mubarrizi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur.”

<sup>17</sup>Rosita and Sutrisna, “Pengaruh. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi.”

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pajak daerah dan Rentrebusi daerah.<sup>18</sup>

Pergerakan aktivitas ekonomi dalam memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat selama kurun waktu tertentu dapat ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi stagnan atau menurun meskipun daerah mampu menjaring Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, pengembangan daerah tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Besaran atau jumlah PAD yang diterima suatu daerah sebaiknya tidak menjadi ukuran dari pergerakan aktivitas perekonomian, namun diukur dari sejauh mana PAD tersebut dalam mengatur aktivitas perekonomian di daerah, sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang disebut Dana Perimbangan, dimana dana perimbangan ini berfungsi untuk membiayai kebutuhan suatu daerah. Sama halnya seperti pendapatan daerah lainnya, dana perimbangan digunakan untuk mendanai proses pembangunan daerah melalui belanja langsung dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan menciptakan kesejahteraan di seluruh masyarakat.<sup>20</sup> Untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar

---

<sup>18</sup>Abid Muhtarom, "Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015," *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2, no. 1 (2017): 15-Halaman.

<sup>19</sup>Erika Apulina Siregar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara," *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 2 (2019): 160-70.

<sup>20</sup>Ni Kadek Herni Wijayanti and Ida Bagus Darsana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui

daerah tersebut maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang di atur oleh UU. No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan. Keuangan antara pusat dan daerah. Terdapat trilogi Dana perimbangan dimana dana perimbangan terbagi menjadi dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH).<sup>21</sup> Proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam melalui adanya transfer dari pemerintah pusat sehingga akan berdampak terhadap mutu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi masyarakat, serta rumah tangga pemerintah daerah dapat diaurus/diatur sendiri.<sup>22</sup>

DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*) yaitu meningkatkan kualitas kesehatan, Pendidikan dan lainnya, melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*).<sup>23</sup>

DAK yang memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana

Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013),” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4, no. 9 (2015): 44573.

<sup>21</sup>Rosita and Sutrisna, “Pengaruh. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi.”

<sup>22</sup>Hendra Kusuma, “Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* 9, no. 1 (2016): 1–11.

<sup>23</sup>AAIA Swandewi, “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 3, no. 7 (2014): 356–76.

dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah. Adanya pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur.<sup>24</sup> Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>25</sup>

Pendapatan Asli Daerah menjadi konsekuensi logis dalam pemerintahan, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas kesejahteraan masyarakat yang sifatnya universal, selain Pendapatan Asli Daerah dari pajak penerimaan seperti dana transfer juga dapat membantu menambah pendapatan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan PAD dan dana perimbangan dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, penggunaan PAD dan dana perimbangan harus fokus pada program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan PAD dan dana perimbangan juga dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat memastikan bahwa penggunaan PAD dan dana

---

<sup>24</sup>Rosita and Sutrisna, "Pengaruh. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi."

<sup>25</sup>Swandewi, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kereserian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali."

perimbangan dilakukan secara efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan PAD dan dana peimbangan dalam merancang pembangunan ekonomi di daerahnya. Dengan besarnya pendapatan daerah yang diperoleh kabupaten Tulang Bawang dan penerimaan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan apakah dapat secara maksimal memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Periode 2014-2021 Perspektif Ekonomi Islam”

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini

1. Variabel bebas yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sedangkan variabel terikatnya adalah Kesejahteraan Masyarakat.
2. Penelitian hanya dilakukan dengan mengambil data Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator pengukur kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.
3. Data yang menjadi objek penelitian adalah periode tahun 2014 sampai dengan 2021 di Kabupaten Tulang Bawang. Variabel yang di uji yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.
4. Masalah yang diteliti adalah analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang

dalam perspektif ekonomi islam. Adapun yang subjek dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia dan masyarakat kabupaten Tulang Bawang. Objek penelitian ini yaitu PAD dan Dana Perimbangan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang?
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam perspektif ekonomi islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas ialah:

1. Mengkaji apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Mengkaji apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam perspektif ekonomi islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian, tentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis maupun pihak lain, berikut manfaatnya :

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini digunakan untuk menerapkan dan menggunakan teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam di kabupaten Tulang Bawang, dijadikan sumber pengetahuan dan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan ekonomi syariah terutama dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja dinas pemerintahan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini digunakan untuk memberikan pemikiran mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia serta menambah wawasan, literatur dan informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Ekonomi Syariah yang akan melakukan penelitian.
- b. Manfaat bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi seberapa baik kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia.
- c. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia kabupaten Tulang Bawang periode 2014-

2021 sehingga masyarakat dapat menyiapkan diri dalam mengambil langkah untuk di masa mendatang.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur penelitian ini karena membantu peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan model yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun perbedaannya terletak pada objek penelitian, tahun penelitian dan permasalahan yang muncul di wilayah penelitian, serta kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut.

**1. Alfian Fuad Mubarrizi**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti dimana yang dimaksud ialah pendapatan asli daerah (PAD) dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2019. Hasil penelitian didapatkan bahwa pendapatan daerah dan indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2019 semuanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Hasil uji statistik dengan alat bantu SPSS versi 23.0 menggunakan analisis uji regresi linear sederhana. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini dapat saja terjadi karena dengan kemandirian ekonomi manusia atau masyarakat yang sudah mencukupi kebutuhannya baik pendidikan, ekonomi dan lainnya. Artinya masyarakat secara mandiri dapat berperan aktif dalam mencapai kesejahteraannya, sedangkan sarana pendukungnya adalah

dari pembangunan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu meneliti Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian penulis meneliti Kabupaten Tulang Bawang, lalu tahun yang diteliti berbeda dimana penelitian terdahulu menggunakan tahun 2018-2019 yakni selama 2 tahun, sedangkan penelitian penulis menggunakan tahun 2014-2021 yakni selama 5 tahun.

2. **Abid Muhtarom**, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 di Kabupaten Lamongan dengan judul Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. dalam penelitian ini PAD Kabupaten Lamongan menjadi prioritas utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Dari analisis dapat kita lihat bahwa tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan disebabkan karena jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus naik namun tidak diikuti oleh Kesejahteraan Masyarakat yang diindikasikan oleh IPM (Index Pembangunan Manusia) yang tidak stabil bahkan beranjak naik. Angka Harapan hidup yang cenderung tetap setiap tahunnya, Index pendidikan yang terus naik 2010-2014 tetapi tidak cukup signifikan dan besar. Hingga index daya beli masyarakat Lamongan yang cenderung naik namun tidak terlalu besar, menjadikan

---

<sup>26</sup>Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

variabel penelitian tidak signifikan.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan penulis melihat dari segi perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian terdahulu tidak melihat dari perspektif ekonomi islam.

**3. Ida Ayu Putu Mega Rosita & I Ketut Sutrisna,**

penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi BALI. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dimana teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis path. PAD dan dana perimbangan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh langsung ditunjukkan oleh PAD terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengaruh tidak langsung ditunjukkan oleh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang positif signifikan dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memediasi pengaruh antara PAD dan dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu tidak menggunakan periode tertentu dan penelitian terdahulu juga tidak melihat dari segi perspektif ekonomi islam.

---

<sup>27</sup>Muhtarom, "Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015."

<sup>28</sup>Rosita and Sutrisna, "Pengaruh. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi."

4. **Rahman, R.** penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Populasi dalam penelitian ini berupa data PAD dan IPM, pengambilan sampel secara *purposive sampling* yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007-2014. Metode analisis data menggunakan Regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y).<sup>29</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda.
5. **Rangkuty, D. M., Yusuf, M. & Pasaribu, R. A.** penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah analisis linear berganda. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama Terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi

---

<sup>29</sup>Rahman Rahman, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Sumatera Utara. Setiap pemerintah di provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>30</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dilakukan sesuai dengan menggunakan buku pedoman penulisan akhir mahasiswa program sarjana UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Konteks dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan berbagai sub bab yaitu diantaranya Penegasan Judul, Latar Belakang, Batas Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kajian penelitian terdahulu Yang Relevan, dan Sistematika Penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini, menjelaskan berbagai sub di antaranya adalah Teori-Teori Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Kesejahteraan Masyarakat, Kerangka Berpikir Hipotesis dan Korelasi Antar Variabel

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, menjelaskan berbagai sub di antaranya adalah Jenis Dan Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Populasi Dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian Dan Metode Analisis Data

---

<sup>30</sup>Dewi Mahrani Rangkuty, Mohammad Yusuf, and Rothsalina Agustia Pasaribu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara," *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 1 (2022): 41–52.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam bab ini, menjelaskan Hasil Dan Pembahasan Penelitian. Seperti Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Penelitian, Analisis Data Dan Pembahasan.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, menjelaskan hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan serta saran yang didapatkan dari analisis hasil penelitian







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Stewardship Theory*

#### 1. Pengertian *Steward Theory*

Teori yang menjelaskan hubungan principal dan agent ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori *principal-agent* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit atau eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agent akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal.

Menurut Purwati, “*Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara principal sebagai pihak pertama dengan agent sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak principal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut, sedangkan pihak agent bertugas menerima dan menjalankan kontrak sesuai dengan keinginan pihak principal*”.

Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu penggunaan dana dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi

kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Disitulah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik.

## 2. *Stakeholder Theory*

Selain teori *stewardship*, teori lain yang mendasarkan penelitian ini adalah teori *Stakeholder*, istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute (RSI)* pada tahun 1963. *Freeman* mendefinisikan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* teori merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Sedangkan *Byson* mendefinisikan *stakeholder* ialah suatu individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa aset untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Syaputra Fedrian, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2018” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).hlm.10

### 3. Teori Fiskal *Federalism*

Teori ekonomi publik mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari alokasi, distribusi dan stabilisasi. Musgrave menyatakan terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasi.

Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer dan pinjaman daerah yang di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Teori Fiskal *Federalism* menjelaskan tentang penyusunan anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah. Penjelasan adalah penerapan desentralisasi anggaran yang menyebabkan pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat, jadi pemerintah mampu mengetahui informasi tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah akan lebih paham mengetahui tentang sumber daya ekonomi di daerahnya. Dalam pengetahuan pemerintah mengenai informasi yang sedang dibutuhkan masyarakat maka dengan inilah yang bisa digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>32</sup>

### 4. Teori Indeks Pembangunan Manusia Islam

Pembangunan ekonomi Islam menurut M.Umer Chapra adalah satu satunya pembangunan ekonomi yang

---

<sup>32</sup> Nida Budiarti, "Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Melalui Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur" (STIE Perbanas Surabaya, 2019).

berkeadilan. Karena memuat beberapa elemen dan kebijakan strategi yang baik dan tidak merugikan bagi siapapun. Pembangunan ekonomi dalam *Khasanah* Islam dikenal dengan istilah „*umran al-alam* yang berarti memakmurkan bumi yang tak lain adalah tugas utama manusia sebagai *khalifah*. Pembangunan ekonomi dalam islam di artikan sebagai upaya secara sadar untuk membuat perubahan structural dalam lingkungan sosio-ekonomi, yang terjadi bersamaan dengan penerapan hukum Islam dan nilai nilai kebijakan, sehingga memacu kapasitas produktif manusia yang maksimal dan pemanfaatan terbaik dari sumber daya yang tersedia, dengan tujuan tercapainya keseimbangan antara aspek material dan spiritual.<sup>33</sup>

## **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah

---

<sup>33</sup> Lidiawati Evi, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

daerah dalam mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Halim di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>35</sup>

Menurut Warsito di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina

---

<sup>34</sup>Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

<sup>35</sup> Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Deepublish, 2018)., hal 23.

Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>36</sup>

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sector diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

## 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah

---

<sup>36</sup> Wulandari and Iryanie., hal 24.

merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak lain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah terdapat di kabupaten atau kota terdiri dari jenis pajak yang terdapat di kabupaten atau kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak peneranan jalan
- 6) Pajak parker

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dibagi tiga golongan:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi jasa perizinan tertentu.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
 Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.<sup>37</sup>
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, karena mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu.

Lain-lain pendapatan asli daerah didapatkan dari sumber-sumber berikut: Hasil penjualan barang milik daerah; Jasa giro; Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah; Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda retribusi; Fasilitas sosial dan umum; Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; Pendapatan hasil eksekusitas jaminan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nina Hartiningsih and Edyanus Herman Halim, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau," *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* Vol VII No (2015): 260.

<sup>38</sup> Novita Sari, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).



### C. Dana Perimbangan

Merujuk Pada UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu Daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Keuangan pusat akan mempengaruhi keuangan daerah, hal ini terlihat dari tingginya ketergantungan daerah pada sumbangan pusat ini. Dana yang dikelola oleh daerah dalam struktur APBN dimasukkan dalam pos Dana Perimbangan bagaimana proses perhitungan, pembagian ke daerah secara detail dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.<sup>39</sup>

Dana Perimbangan meliputi:

#### 1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN berupa pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan sumber daya alam, yang dibagi hasilnya kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

##### a. Dana Bagi Hasil Pajak meliputi:

1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), berdasarkan Pasal 6 dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dengan rincian dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota, dan 90% untuk daerah.

DBH-PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk provinsi bersangkutan
- b) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk biaya-biaya pemungutan

---

<sup>39</sup> Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan and Shita Tiara, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara," *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 4, no. 2 (2021): 127–140.

- 2) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH-BPHTB) dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dibagikan dengan rincian kepada seluruh kabupaten dan kota, dan 80% untuk daerah dibagikan dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan .
- 3) DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh), merupakan bagian dari Transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan pajak penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 29.- PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai pajak penghasilan, -sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penerimaan negara dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. DBH- PPh WPOPDN Pasal dan PPh pasal 21 dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 8% untuk provinsi yang bersangkutan
  - b) 12% untuk kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan rincian;
    - 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar
    - 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.
- 4) DBH Cukai Hasil tembakau (DBH-CHT), yaitu transfer dari pusat yang mengalokasikan ke

provinsi penghasil cukai dan provinsi penghasil tembakau.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Merujuk Pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 11 ayat 3 yaitu DBH-SDA yang dimaksud pada ayat 1 berasal dari :

- 1) Kehutanan;
- 2) Pertambangan umum;
- 3) Perikanan;
- 4) Pertambangan minyak bumi;
- 5) Pertambangan panas bumi.

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- 2) Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
- 3) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- 4) Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

- 5) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
    - a) 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
    - b) 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
  - 6) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
    - a) 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah.
    - b) 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
  - 7) Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
2. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Dalam Pasal 7 ayat 1 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. Pasal 7 ayat 2 yaitu DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing

10% dan 90% dari dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat 1.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai.

### 3. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. yang dimaksud daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.

Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan sejak tahun 2003. Pada

tahun tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Dari tahun ketahun pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai DAK, serta jumlah daerah penerima.<sup>40</sup>

#### **D. Penerimaan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sumber keuangan pada masa Rasulullah SAW pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’I dlararin aam*”

---

<sup>40</sup>Sari, “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

(menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugiannya yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allahta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an Al-Hujurat 49:15:<sup>41</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا  
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.*<sup>42</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat: 41.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang*

<sup>41</sup>Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

<sup>42</sup> <https://tafsirweb.com/9785-surat-al-hujurat-ayat-15.html>

*demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoprasikan pelayanan publik untuk menjamin terpenuhinya kepentingan soaial.

Pendapatan Asli Daerah atau negara dalam islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatana resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari zakat, *fay'I*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr* (bea cukai), negara berhak mempelajari untuk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Adapun beberapa sumber penerimaan daerah dalam islam yaitu :<sup>43</sup>

#### 1. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Perlu diketahui bahwa UU No. 11 tahun 2006 Pasal 180 ayat (1) huruf (d) menyebutkan “Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh” penetapan zakat sebagai PAD dimulai sejak UU No 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak diberikan untuk pemerintahan daerah lainnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah

---

<sup>43</sup> Dedek, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017.”



diberlakukan di Indonesia.<sup>44</sup> Pada periode Madina, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 43 .<sup>45</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)*

## 2. *Fay'I*

*Fay'I* berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminology hukum *fay'I* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. *Fay'I* disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat.

## 3. *Jizyah*

*Jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka masing-masing. Jadi *jizyah* tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-Taubah ayat 29 :

<sup>44</sup> Dahlawi Dahlawi, Herizal Herizal, and Saddam Rasanjani, "Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Aceh," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 18, no. 1 (2021): 86–105.

<sup>45</sup> Siti Hayati, "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018). Hlm.18

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا  
 يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
 صَاغِرُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Jizyah dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk *fay*’I didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun tidak.<sup>46</sup>

#### 4. Kharaj

Adapun *kharaj* adalah uang yang dikenakan atas tanah. Ia termasuk hak yang harus ditunaikan. Keterangan tentang *kharaj* didalam al-qur’an berbeda dengan jizyah karena pengelolaan *kharaj* diserahkan kepada *ijtihad* para imam (*khalifah*).

<sup>46</sup> Fedrian, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2018.”

5. *Usyr* (bea cukai)

Sumber penerimaan lainnya dalam kajian kebijakan fiskal ekonomi islam adalah ‘*usyr*. Dikalangan ulama fiqih, ‘*usyr* (10%) memiliki dua makna, yaitu 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10% diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan.<sup>47</sup>

6. *Ghanimah*

*Ghanimah* merupakan harta rampasan perang yang diperuntukan bagi kepentingan sedekah, Rasulullah dan kepentingan-kepentingan rakyat terutama para fakir miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Dapat diartikan sebagai pungutan wajib, atau semacam pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tidak berpenghasilan.

## **E. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut kamus bahasa Indonesia, Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan baik dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam kondisi sehat, damai, makmur dan selamat. Dalam artian yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang tenang secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun

---

<sup>47</sup> Dedek, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017.”

dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.<sup>48</sup>

Menurut Midgley, memperjelas bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: Pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.

*World Health Organization* (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, standard dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>49</sup>

Menurut Rambe dalam buku Euis Sunarti, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality humen life*), yaitu suatu keadaan ketika

---

<sup>48</sup>Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

<sup>49</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (PT Refika Aditama, 2012).

<sup>50</sup> Euis Sunarti, "Indikator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan," *Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, ISBN, 2005, 607-978.

terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.<sup>51</sup>

Tingkat kesejahteraan rakyat meliputi kesejahteraan materil dan non materil. Kesejahteraan materil meliputi pendapatan, kepemilikan harta benda, termasuk keadaan fisik rumah tempat tinggal bersama fasilitasnya. Sedangkan kesejahteraan non materil meliputi keadaan pendidikan, kesehatan, keberhailan dan lain-lain. Dijelaskan dalam pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB.

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan

---

<sup>51</sup> Levi Martin Hadiyanti, "Analisis Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Genteng Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

d. **Keluarga Sejahtera III**

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

e. **Keluarga Sejahtera III Plus**

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>52</sup>

## **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk di realisasikan. Masyarakat yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup, namun kesejahteraan tidak dapat di capai begitu saja. Banyak cara dan pengorbanan yang harus dilewati untuk meraih kesejahteraan yang di idamkan oleh masing-masing individu, misalnya dengan pendidikan yang tinggi, individu tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjaga kesehatan individu tersebut.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kegiatan Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai

---

<sup>52</sup>Zaenal Tanjung, "Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2016, hlm.42.

kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, dan pembangunan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur tercapai tidaknya pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan masyarakat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan.<sup>53</sup>

Indikator kesejahteraan masyarakat cukup luas atau multidimensional dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan masyarakat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek pembangunan. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.<sup>54</sup> Selain itu kesejahteraan masyarakat menurut Pratowo, diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitik beratkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.<sup>55</sup>

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang terkait kepentingan publik

---

<sup>53</sup> Budiarti, "Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Melalui Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur."

<sup>54</sup> Budiarti.

<sup>55</sup> Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

semestinya mendapatkan pengalokasian anggaran yang lebih besar oleh pemerintah daerah. Menurut Ping dan Bai menyatakan bahwa barang publik yang sifatnya mendasar seperti kesehatan, pendidikan, sistem jaminan sosial, dan pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu angka indeks pembangunan manusia dapat digunakan untuk mengamati kesejahteraan masyarakat yang dimana terdiri atas beberapa indikator yang meliputi indikator kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, indikator bidang pendidikan yang dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah, indikator bidang kesejahteraan atau hidup layak yang diukur berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.<sup>56</sup>

**a. Indeks Pembangunan Manusia**

UNDP (*United Nations Development Programme*), memberikan pengertian bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP.<sup>57</sup> sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian

---

<sup>56</sup> Wijayanti and Darsana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013)."

<sup>57</sup>UNDP: United Nation Development Programme,1995: 103



- 2) Pembangunan dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- 3) Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya guna meningkatkan pembangunan manusia diantaranya pemerataan distribusi, pengalokasian anggaran secara tepat dan memadai dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Konsep pembangunan yang fokus pada manusia, pembangunan harus dilakukan secara seimbang. Seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Artinya bahwa pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan kemampuan manusia saja, misalnya kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang

---

<sup>58</sup>Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

ataupun memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Namun juga harus memperhatikan bagaimana manusia memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang dapat meningkatkan hidup ketingkat yang lebih baik, misalnya dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bekerja.<sup>59</sup>

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu:

- 1) Lama hidup, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup ketika lahir yang mewakili bidang kesehatan; semakin tinggi Angka Harapan Hidup berarti semakin rendah angka kematian. AHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik.
- 2) Rata-rata lama sekolah, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mengukur capaian dibidang pendidikan;
- 3) Rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian

---

<sup>59</sup>BPS Polewali Mandar , Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015, h. 7

pembangunan untuk standar hidup layak dan kemampuan daya beli.<sup>60</sup>

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini:

1. Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ( $IPM < 50$ ).
2. Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ( $50 < IPM < 66$ ).
3. Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ( $66 < IPM < 80$ ).
4. Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ( $IPM > 80$ ).<sup>61</sup>

#### **b. Konsep Indeks Pembangunan Manusia Islam**

Ekonomi pembangunan Islam dibentuk berlandaskan pada *Islamic worldview* yang menempatkan panduan utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan (termasuk kegiatan berekonomi) secara individu maupun entitas atau kelompok bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Konsep pendekatan pembangunan dalam Islam menurut M. Umer Chapra :

##### 1) Konsep *Tauhid*

Tauhid adalah bukti komitmen kepercayaan manusia kepada Allah dan menjadi acuan dasar bagi manusia dalam mengadakan hubungan sesama manusia.

---

<sup>60</sup>Yunita Mahrany, Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. Jurnal. 2012, h. 15

<sup>61</sup> Putu Gde Mahendra Putra and IGKA Ulupui, "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia," *E-Jurnal Akuntansi* 11, no. 3 (2015): 863–77.

2) Konsep *Rububiyah*

Konsep kedua ini berfungsi sebagai undang-undang alam semesta yang mengatur cara dan proses bagaimana sumberdaya alam digunakan untuk pembangunan umat.

3) Konsep *Khalifah*

Konsep ini berdasarkan kepada status atau keberadaan manusia dimuka bumi sebagai seorang khalifah dan akan mempertanggung jawabkan kekhalifahannya kepada sang khaliq, konsep ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan kepercayaan kepada manusia dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki moralitas, politik dan ekonomi serta prinsip kehidupan. Firman Allah SWT. Dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  
خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَآءَ وَحَنُنُ نُسُوحٍ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي  
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

#### 4) Konsep *Takziyah*

Konsep ini dapat dilihat dari tugas mulia yang dilakukan semua Nabi Allah dalam membersihkan dan membangun umatnya dalam setiap tindak tanduk hubungannya dengan sesama manusia, alam sekitat, Negara dan masyarakat<sup>62</sup>

Di dalam konsep dasar pembangunan ekonomi Islam, sumber daya manusia juga menjadi fokus utama selain *tauhid*, *tazkiah an-nafs*, dan peran pemerintah. Begitu juga menurut Abdillah, manusia merupakan makhluk pembangunan yang merupakan mandataris *Ilahi* dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Pengertian tugas mandataris *Ilahi* yang dimaksud yaitu dalam melaksanakan pembangunan. Tolak ukur manusia berkualitas dapat dilihat dari produksi dan hasil karya manusia itu sendiri sehingga kualitas manusia harus diperhatikan untuk esensi dan kemajuan bangsa (Abdillah, 2001:72-74), sebagaimana pesan dalam Q.S. Hud: 61

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Haikaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karenaitu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

<sup>62</sup>Lidiawati Evi, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

*Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"*<sup>63</sup>

Dalam surat Hud ayat 61 di atas, dinyatakan bahwa manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di muka Bumi yang mengemban tugas untuk memakmurkannya. Dalam konteks kehidupan manusia yang sesungguhnya, ayat tersebut dapat dipahami dengan melaksanakan pembangunan.<sup>64</sup>

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya sebagai pusat penisihan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga

---

<sup>63</sup> "Qur'an Kemenag."

<sup>64</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum and U Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217–40.

merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan jika mengalami keluhan sakit sehingga harus berobat jalan atau menginap. Tidak hanya faktor jarak ke fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan dan kondisi sosial ekonomi penduduk untuk membiayai pengobatan juga menjadi pertimbangan yang memengaruhi pemilihan fasilitas kesehatan.

Selain memanfaatkan fasilitas kesehatan, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan juga banyak yang lebih memilih untuk tidak berobat jalan dan mengobati sendiri sakitnya baik dengan menggunakan obat modern maupun tradisional. Persentasenya mencapai lebih dari separuh (61,29 persen) dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2021. Di samping itu, terdapat 27,97 persen merasa tidak perlu untuk berobat. Alasannya karena rumah tangga

menganggap penyakit yang dideritanya tidak terlalu berat.

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara *preventif*, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. Dengan menjaga kesehatan akan tercipta tubuh yang sehat didalam tubuh yang sehat terdapat rohani yang sehat dan jasmani yang kuat yang dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Ajaran Islam selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal, baik dan halal itu baik secara dzatnya maupun cara mendapatkannya. Di bahas dalam Al-Quran QS. Thaha: 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ  
عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

*Artinya: Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.*

#### d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses



belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Teori *Human Capital* mengatakan bahwa populasi yang berpendidikan merupakan penduduk usia produktif, teori *Human Capital* menekankan bagaimana pendidikan meningkatkan teori produktifitas dan efisiensi pekerja dengan meningkatkan tingkat stok kognitif kemampuan pekerja manusia produktif secara ekonomi yang merupakan produk dari kemampuan bawaan dari investasi pada manusia. Penyediaan pendidikan formal dipandang sebagai investasi modal manusia yang dianggap sama atau bahkan lebih berharga dari modal fisik.<sup>65</sup>

Betapa pentingnya pendidikan, karena hanya dengan proses pendidikanlah manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang mulia, melalui pemberdayaan potensi dasar dan karunia yang telah diberikan Allah. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan kepada pengajaran yang berorientasi kepada intelektualitas penalaran, melainkan lebih menekankan kepada pendidikan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang utuh dan bulat. Pendidikan Islam menghendaki

---

<sup>65</sup>Mubarrizi.

kesempurnaan kehidupan yang tuntas sesuai dengan firman Allah pada surat Al Baqarah ayat 208

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.*

Bagi manusia pendidikan penting sebagai upaya menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam pada kehidupan nyata melalui pribadi-pribadi muslim yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan harkat dan derajat kemanusiaan sebagai khalifah di atas bumi.<sup>66</sup>

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.<sup>67</sup> Salah satu tujuan dari *sustainable development goals* (SDGs) adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai

<sup>66</sup>Anisa Syahrani, "Analisis Pengaruh Kemiskinan, Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2014-2016)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>67</sup>Ikhwan Abidin Basri, "Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat" (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hlm. 96.

kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

## **F. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam**

### **1. Definisi Kesejahteraan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Istilah kesejahteraan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan kemajuan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu, seperti Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan mengacu kepada masalah negara maju.<sup>68</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Kalau kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul mal.

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafau ar-Rasidi dengan mengeluarkan dana Baitulmal. Kedua jenis kebijakan ini

---

<sup>68</sup>Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, H. 19

dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

- a. Penyebaran Islam.
- b. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Pembangunan infrastruktur.
- e. Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
- f. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Dari sejarah singkat yang penulis kutip di atas tentang kebijakan pemerintah yang diambil dalam pertumbuhan ekonomi pada permulaan Islam, kita bisa melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti bagi perkembangan ekonomi. Dalam hal ini Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban social (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga.
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Masyarakat madani atau industrial yang ideal berdasarkan Qur'ani dibangun dengan landasan:

- a. Kebersamaan dan tolong-menolong dalam segala aktifitas pembangunan.
- b. Keadilan dan kebijakan.
- c. Amar ma'ruf nahi mungkar menuju kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

- d. Berakhlak Islam.
  - 1) Menunaikan amanah.
  - 2) Menunaikan janji.
  - 3) Memperbaiki hubungan antar manusia.
  - 4) Larangan mengkhianati amanah.
  - 5) Larangan menghina dan meremehkan.

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- b. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
- c. Menjaga hukum dan ketertiban.
- d. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi..
- e. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.<sup>69</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak di anggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.<sup>70</sup>

## 2. Prinsip Ekonomi Islam

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-

---

<sup>69</sup>Lalu Muhammad Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam" (Ntb, Iai Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013), hlm.374-376.

<sup>70</sup>Mubarrizi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur."

prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas dan landasan yang mantap serta cara-cara mendapatkannya yang transparan akan menjadikan amal perbuatan yang mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah SWT. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Berikut adalah prinsip dalam ekonomi islam:

a. Keimanan kepada Allah SWT (*Tauhid*)

Tauhid merupakan pondasi ajaran islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah karena Allah adalah pencipta alam dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

b. Kepemimpinan (*Khalifah*)

Dalam Al-qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Status khalifah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan tersebut. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta ini. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapat

keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu itu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instintif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.

c. Keadilan (*'adl*)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripada-Nya secara adil dan baik. Keadilan dalam hukum islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan karena itu harta jangan hanya beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

d. *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model

yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

e. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat<sup>71</sup>. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.<sup>71</sup>

3. Tujuan Syariah Dalam Kesejahteraan

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk mencapai falah dan kedua tujuan mashlahah.

a. *Falah*

Menurut Islam falah dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental

---

<sup>71</sup> Fedrian, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2018."



dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada kemanusiaan dan keadilan. pembangunan seperti yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid asy-syariah).

b. *Mashlahah*

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang sehingga akan memberikan dampak yang disebut mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. tujuan ekonomi Islam menurut As-Shaitibi adalah mencapai kesejahteraan manusia dan terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.<sup>72</sup>

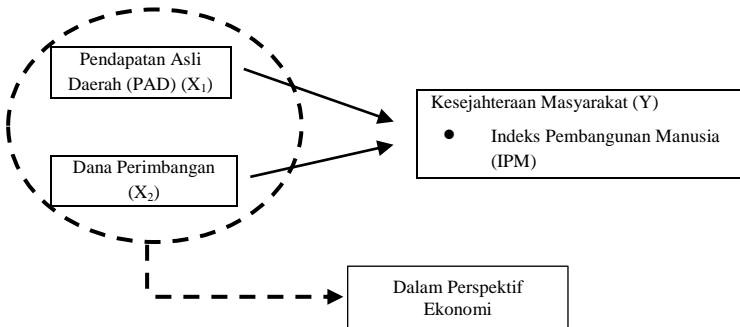
## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsep berpikir digunakan untuk mempermudah penulis mengetahui arahan tujuan penelitiannya. Kerangka berpikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>73</sup> Adapun kerangka berfikir pada penulisan ini adalah

---

<sup>72</sup>Rusmala Dewi, "Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h.67-69.

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dua Kombinasi (Mixed Method)* Jakarta: CV Alfabeta, 2013), 93



**Gambar 2.1**  
**Model Analisis**

Keterangan :

- : Hubungan Langsung Secara Parsial  
 - - - - - → : Hubungan Langsung Secara Simultan

Apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan baik secara jumlah dan kualitas maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dengan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ ), selanjutnya akan di analisis dalam prespektif ekonomi syariah.

## H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat dugaan dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris (fakta lapangan). Hipotesis dapat benar atau terbukti dan tidak terbukti setelah didukung oleh fakta-fakta dari hasil

penelitian lapangan.<sup>74</sup> Dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis dan beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan di sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.**

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya (UU No. 4/2004). PAD merupakan sumber pendanaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal ini, PAD sebagai pengukur pendapatan daerah sendiri yang sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap IPM, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ida Ayu Candra Yunita Sari & Ni Luh Supadmi yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh signifikan

---

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Alfabeta, 2019.Hal.63

terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia.<sup>75</sup>

Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang.

## **2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang**

Dana perimbangan dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung program-program sosial. Namun, pengelolaan dana perimbangan yang baik dan efektif juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di daerah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saragih dalam penelitian terdahulu Anak Agung Istri Agung Swandewi, DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan

---

<sup>75</sup>Raudya Ahyiini Prabafitri, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017" (STIE Perbanas Surabaya, 2019).

fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*) yaitu meningkatkan kualitas kesehatan, Pendidikan dan lainnya, melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*).<sup>76</sup>

Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0 : Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang.

H2 : Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang.



---

<sup>76</sup> Swandewi, “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.”

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Basri, Ikhwan. "Islam Dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat," hlm. 96. Jakarta: Gema Insani Pers, 2009.
- Aditya, Dina Mei Eka, and Maryono Maryono. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi)," 2018.
- Budiarti, Nida. "Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Melalui Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Jawa Timur." STIE Perbanas Surabaya, 2019.
- Cindy, Anggraini. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Dahlawi, Dahlawi, Herizal Herizal, and Saddam Rasanjani. "Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Aceh." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 18, no. 1 (2021): 86–105.
- Dedek, Rahmawari. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung – Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2017." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Dewi, Rusmala. "Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," h.67-69. IAIN Raden Intan, Lampung, 2016.
- Evi, Lidiawati. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021." Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama, 2012.
- Faizal, Muhammad. "Pembimbingan Berita Revitalisasi Taman Tegalega." *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, 2018, 31–41.

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0v8u6us\\_1AhXo9nMBHTM5DI8QFnoECBUQAww&url=https%3A%2F%2Felib.unikom.ac.id%2Fdownload.php%3Fid%3D339445&usg=AOvVaw2\\_fyze9MVIJmP02CdBQFyK](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0v8u6us_1AhXo9nMBHTM5DI8QFnoECBUQAww&url=https%3A%2F%2Felib.unikom.ac.id%2Fdownload.php%3Fid%3D339445&usg=AOvVaw2_fyze9MVIJmP02CdBQFyK).

- Fedrian, Syaputra. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2018.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Fitriani, F. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2005-2015.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Gazali, Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2015): 84–102.
- Gujarati et al. “Dasar Dasar Ekonometrika Buku 2.” Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hadiyanti, Levi Martin. “Analisis Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Genteng Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran).” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hartiningih, Nina, and Edyanus Herman Halim. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau.” *Jurnal Tepak Manajemen VBisnis* Vol VII No (2015): 260.
- Hasibuan, Nanda Fitrah Gemilang, and Shita Tiara. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.” *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)* 4, No. 2 (2021): 127–40.
- Hayati, Siti. “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung).” UIN Raden Intan

Lampung, 2018.

- Indah, Kurniati. "Analisis Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Ex-Dividend Date (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Keuangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Syariah Periode 2014-2018 Perspektif Ekonomi Islam)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.
- Kusuma, Hendra. "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* 9, no. 1 (2016): 1–11.
- Mubarrizi, Alfian Fuad. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur." 2021.
- Muhammad Iswandi, Lalu. "Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam," hlm.374-376. Ntb, Iai Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013.
- Muhtarom, Abid. "Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015." *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2, no. 1 (2017): 15-Halaman.
- Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang." *Jurnal El-Riyasah* 11, no. 1 (2020): 67–83.
- Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Maro* 1, no. 2 (2018): 117–22.
- Prabafitri, Raudya Ahyiini. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017." STIE Perbanas Surabaya, 2019.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, and U Sulia Sukmawati. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217–40.
- Priatna, Husaeri, and Jaya Purwadinata. "Pengaruh Pendapatan Asli



Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung).” *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2019): 62–74.

“Profil Kabupaten Tulang Bawang,” n.d.  
<https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-tulang-bawang/>.

Purwanti, Novi Dwi. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 2, no. 3 (2014).

Putra, Putu Gde Mahendra, and IGKA Ulupui. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.” *E-Jurnal Akuntansi* 11, no. 3 (2015): 863–77.

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an. “Qur’an Kemenag,” n.d.  
<https://quran.kemenag.go.id/>.

Rahman, Rahman. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Rangkuty, Dewi Mahrani, Mohammad Yusuf, and Rothsalina Agustia Pasaribu. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara.” *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 1 (2022): 41–52.

Rosita, I A, and I Ketut Sutrisna. “Pengaruh. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi.” *E-Jurnal EP Unud* 7, no. 7 (2018): 1445–71.

Santoso, Singgih. “Panduan Lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS 17.” *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*, 2009, 29–35.

Sari, Novita. “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

- Siregar, Erika Apulina. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara.” *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1, no. 2 (2019): 160–70.
- Sugiyono, Metode. “Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).” *Bandung: Alfabeta*, 2015.
- Suminartini, Suminartini, and Susilawati Susilawati. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 3 (2020): 226–37.
- Sunarti, Euis. “Indikator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan.” *Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, ISBN*, 2005, 607–978.
- Swandewi, AAIA. “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 3, no. 7 (2014): 356–76.
- Syahrani, Anisa. “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2014-2016).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Tanjung, Zaenal. “Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 2016, hlm.42.
- Utami, Desak Nyoman, and I Gusti Bagus Indrajaya. “Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali.” *E-Jurnal EP Unud* 8, no. 10 (2019): 2195–2225.
- Widarjono, Agus. “Ekonometrika Edisi Keempat.” *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2018.
- . *Ekonometrika Edisi Kelima*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018.

Wijayanti, Ni Kadek Herni, and Ida Bagus Darsana. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013)." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4, no. 9 (2015): 44573.

Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish, 2018.

